

ISSN : 1978-0362

**JURNAL**  
**SOSIOLOGI REFLEKTIF**



Laboratorium Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**JURNAL  
SOSIOLOGI REFLEKTIF  
Laboratorium Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Volume 9, Nomor 2, April 2015**

---

PENGELOLA JURNAL

**Ketua Penyunting :** Muryanti, MA  
**Sekretaris Penyunting :** Puspo Reni Rahayu, S.Sos  
**Penyunting Pelaksana :** Sulistyaningsih, M.Si,  
Ahmad Zainal Arifin, P.Hd, Dr. Yayan Suryana,  
**Sekretariat :** Beng Pramono, Arifiartiningih  
**Desain Sampul & Tata Letak :** Kirman  
**Diterbitkan oleh :** Laboratorium Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
**Alamat Redaksi :** Laboratorium Sosiologi,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl. Marsda Adisucipto No.1, Yogyakarta  
Telp (0274) 51957; Fax. (0274) 519571  
Email: [sosiologirefleksif@uin-suka.ac.id](mailto:sosiologirefleksif@uin-suka.ac.id) dan  
[sosiologirefleksif@gmail.com](mailto:sosiologirefleksif@gmail.com)

---

Sosiologi Reflektif adalah jurnal yang dikelola oleh Laboratorium Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Media ini menekankan kajian seputar persoalan-persoalan sosial. Redaksi juga menerima tulisan seputar dinamika sosial baik yang bersifat teoritis, kritik, reflektif, opini, dan berbagai ide-ide dinamika sosial kemasyarakatan. Tulisan minimal 20 halaman kuarto, spasi ganda, dilengkapi dengan abstrak (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia), catatan kaki, dan daftar pustaka. Penulis juga harus menyertakan nama lengkap bersama asal universitas atau lembaga profesional, alamat lengkap dan alamat email, nomor telepon, dan beberapa kalimat biografi penulis.

# JURNAL SOSIOLOGI REFLEKTIF

---

## DAFTAR ISI

<b>Transmitting Charisma: Re-Reading Weber Through The Traditional Islamic Leader in Modern Java</b> <i>Achmad Zainal Arifin</i> .....	1
<b>Strategi Pengorganisasian Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) dalam Pengelolaan Program HIV/AIDS</b> <i>Henri Puteranto</i> .....	31
<b>Respon Masyarakat Desa Sitimulyo terhadap Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Piyungan Bantul Yogyakarta</b> <i>Sulistyaningsih</i> .....	49
<b>Resistensi Petani terhadap Pertambangan Pasir Besi di Karangwuni Kulon Progo</b> <i>Suliadi</i> .....	79
<b>Identifikasi Rumah Tangga Rawan Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Bantul-DI Yogyakarta</b> <i>Nurhadi</i> .....	103
<b>Pendidikan Politik Koalisi Perempuan Yogyakarta Wilayah Yogyakarta 2000-2008</b> <i>Sri Roviana</i> . .....	119
<b>Sikap Penonton dalam Program Televisi Indonesia Saat Ini</b> <i>Rahmat Edi Irawan</i> .....	139
<b>Pengaruh Kepuasan Komunikasi terhadap Kinerja Pendidik IPDN Jatinangor</b> <i>Yani Tri Wijayanti, Asep Suryana, Mien Hidayat, dan Funny Mustikasari</i> .....	155

<b>Sosiologi Kaum Sufi: Sebuah Model Studi Integratif-Interkonektif</b>	
<i>Dudung Abdurahman.</i> .....	175
<b>Hegemoni Kriteria Estetik: Tinjauan Sosiologi Sastra atas Cerpen Pilihan Kompas dan Cerpen Kompas Pilihan</b>	
<i>Adib Sofia.</i> .....	191
<b>Pendidikan Damai: Upaya Mencegah Budaya Anarkisme Pendidikan</b>	
<i>Muh. Syamsuddin.</i> .....	213
<b>Islam dan Pekerjaan Sosial</b>	
<i>Zulkipli Lessy.</i> .....	235
<b>Pesantren dan Islam Indonesia: Kajian atas Pembaruan dan Peran Sosial Transformatif</b>	
<i>Achmad Maulani.</i> .....	253
<b>Aksi Kolektif dalam Bersepeda: Studi Banding Atas Sego Segawe (Sepeda Kanggo Sekolah Lan Nyambut Gawé) dan JLFR (Jogja Last Friday Ride) di Kota Yogyakarta</b>	
<i>Mohamad Jamal Thorik.</i> .....	281
<b>Dibalik Kekuatan Ideologi dan Kepentingan</b>	
<i>Hendris.</i> .....	309

## PENGANTAR REDAKSI

*Assalamualaikum wr.wb.*

Dinamika permasalahan umat Islam teramat luas dan menarik untuk dikaji, terkait dengan kelembagaan Islam yang masih eksis selama ini. Peran berbagai macam lembaga tersebut nampak dari upaya yang dilakukannya dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan sosial yang muncul saat ini, misalnya adanya permasalahan AIDS, kepemimpinan dalam konteks kekinian, isu kekerasan yang muncul dalam sistem pendidikan dan lainnya. Permasalahan tersebut akan dibahas di beberapa artikel Jurnal Sosiologi Reflektif Volume 9 Nomor 2, April 2015.

Achmad Zainal Arifin menulis tentang *Transmitting Charisma: Re-reading Weber through the Traditional Islamic Leader in Modern Java*. Artikel ini mencoba untuk menelaah kembali pandangan seorang tokoh klasik sosiologi, Max Weber, berkenaan dengan teori kepemimpinan beliau, lebih khusus lagi pandangan tentang karisma. Dalam hal ini, Weber berpandangan bahwa proses modernisasi, khususnya proses rasionalisasi yang tidak lagi bisa dibendung pengaruhnya, akan menyebabkan otoritas kharismatik akan berubah, terutama ke arah model legal-rasional. Keyakinan bahwa kualitas kharismatis, yang biasanya direpresentasikan oleh kekuatan supranatural, yang dalam pandangan Weber akan tererosi oleh proses modernisasi, justru semakin terinstitusionalisasi dalam dunia pesantren dan bahkan diyakini bisa ditransmisikan melalui institusi-institusi yang ada.

Henri Puteranto menganalisis tentang Strategi Pengorganisasian Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) dalam Pengelolaan Program HIV/AIDS. Penulis menjelaskan problematika pengelolaan program HIV/AIDS muncul ketika suatu organisasi sosial keagamaan menjalankan program ini. Organisasi keagamaan dituntut untuk mampu menjalankan program secara efektif. Namun demikian, dalam

implementasinya akan berhadapan dengan “*body of knowledge*” dari program HIV/AIDS. Menurutnya Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan mampu menjawab isu-isu sensitif di program HIV/AIDS untuk mengurangi stigma dan diskriminasi, membangun legitimasi organisasi dan mengelola manajemen pengetahuan secara efektif.

Artikel Respon Masyarakat Desa Sitimulyo Terhadap Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Piyungan Bantul Yogyakarta ditulis oleh Sulistyaningsih. Penulis menjelaskan bahwa persoalan sampah, terutama persoalan sampah rumah tangga merupakan persoalan penting yang harus segera disikapi secara bijak. Selama ini pengelolaan sampah rumah dilakukan dengan *system sanitary landfill* yaitu sampah harus diolah, dipadatkan dan ditimbun setiap hari. Hal ini sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: *Pertama*, Pengelolaan TPA Piyungan yang berlokasi di Desa Sitimulyo sejak tahun 1995 sampai sekarang telah menimbulkan respon yang bervariasi dari masyarakat Desa Sitimulyo. Ada masyarakat yang merespon pro (setuju) terhadap pengelolaan TPA tersebut, namun ada juga yang kontra (tidak setuju) terhadap TPA. Perbedaan respon yang ada disebabkan karena ada masyarakat yang diuntungkan dan dirugikan adanya TPA di Desa Sitimulyo. *Kedua*, Kebijakan pemerintah Desa Sitimulyo terhadap pengelolaan TPA di Desa Sitimulyo lebih mengikuti aspirasi masyarakat.

Suliadi menulis Resistensi Petani Terhadap Pertambangan Pasir Besi di Karangwuni Kulon Progo. Tulisan ini menjelaskan perubahan sikap politik petani dalam menanggapi ekspansi kapitalisme pertambangan tidak lebih sebagai kompromi politik petani dalam merespon ekspansi tersebut. Menurutnya apa yang sesungguhnya hendak ditolak adalah cara-cara yang ditempuh para pemodal/perusahaan dan negara dalam melakukan ekspansi yang bias kapitalis yang hanya menciptakan masyarakat petani menjadi tersingkir terhadap akses sumber daya yang ada.

Nurhadi menulis artikel tentang Identifikasi Rumah Tangga Rawan Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Bantul-Di Yogyakarta. Faktanya, terdapat perbedaan daya tahan menyebabkan adanya perbedaan dampak bagi setiap rumah tangga yang mengalami bencana. Dampak bencana di daerah rawan bencana Bantul dapat dikategorikan sebagai berikut : (1) orang yang paling kaya menderita

paling sedikit bencana karena kemampuannya mengurangi dampak bencana dengan memperkuat rumahnya dan menggunakan asset yang dimilikinya, (2) penderitaan yang dialami, menjadikan orang miskin mampu mengurangi dampak dari kejadian bencana di masa depan untuk keberlangsungan hidupnya dengan memaksimalkan modal social sehingga meminimalkan biaya untuk membangun rumah dan (3) kelompok bertahan hidup yang paling rentan terhadap peristiwa bencana karena kekayaannya sudah habis untuk biaya rekonstruksi dan ketidakmampuannya mengurangi biaya buruh.

Sri Roviana menguraikan tentang proses Pendidikan Politik Koalisi Perempuan Yogyakarta Wilayah Yogyakarta 2000-2008. Penulis mejelkaskan bahwa perempuan Indonesia termarginalkan dalam proses pengambilan keputusan politik. Berbagai macam organisasi perempuan menyadari pentingnya pendidikan politik bagi perempuan, salah satunya organisasi KPI. Penulis menyimpulkan terhadap program yang dijalankan oleh KPI selama ini menunjukkan bahwa KPI Yogyakarta merupakan embrio dari gerakan sosial baru, akan tetapi pertumbuhan gerakan ini perlu menyingkirkan kelemahan yang muncul di tengah jalan: kesulitan membangun ideologi bersama, representasi politik yang ditunjukkan oleh organisasi elit, tidak adanya konsolidasi yang berbasiskan organisasi, ketergantungan kepada donor dan ketidakmandirian dan pembiayaan sukarela untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi perempuan.

Rahmat Edi Irawan menulis artikel tentang Sikap Penonton dalam Program Televisi Indonesia Saat Ini. Menurutnya saat ini mulai terjadinya pergeseran penonton pasif ke penonton aktif di industri televisi Indonesia. Jika pada masa lalu, banyaknya hambatan, seperti rezim pemerintahan yang represif, tidak adanya pilihan program dan stasiun televisi serta belum adanya regulasi dan regulator menyebabkan lamanya penonton televisi di Indonesia bersikap pasif. Sementara saat ini, pemberdayaan penonton melalui berbagai media dan upaya yang dilakukan KPI menyebabkan kondisinya sudah berubah, penonton mulai aktif bersikap. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatkan sikap kritis mereka, dengan banyaknya melakukan pengaduan atas tayangan yang melanggar regulasi baik melalui KPI atau media massa lainnya.

Yani Tri Wijayanti, Asep Suryana, Mien Hidayat, Dan Funny Mustikasari menganalisis tentang Pengaruh Kepuasan Komunikasi terhadap Kinerja Pendidik IPDN Jatinangor. Hasil penelitian menunjukkan Komunikasi organisasi berpengaruh pada efektivitas

organisasi, salah satunya terkait kinerja. Terpenuhinya kebutuhan informasi dan komunikasi di dalam organisasi menimbulkan kepuasan komunikasi yang dapat meningkatkan kinerja dari karyawan, dalam tulisan ini adalah pendidik di IPDN Jatinangor. Ketika interaksi sosial yang meliputi kontak sosial dan komunikasi dalam organisasi berjalan dengan baik, maka hubungan antar anggota organisasi terkait dengan pekerjaan akan berjalan dengan baik, dan kinerja para anggota organisasi dapat meningkat dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Sosiologi Kaum Sufi: Sebuah Model Studi Integratif-Interkonektif ditulis oleh Dudung Abdurahman. Penulis menjelaskan Kaum Sufi merupakan realitas sosial yang berbasiskan keagamaan pada komunitas-komunitas tarekat. Tarekat sendiri adalah salah satu bentuk implementasi keislaman yang bercorak esoterik, yang secara sosiologis biasa menampilkan aktivitasnya yang terstruktur dalam kelompok guru dan murid. Hubungan antara keduanya terjalin dalam sistem sosial yang konsisten terhadap moralitas dan spiritualitas masyarakat. Karena itu dinamika sosial Kaum Sufi dalam gerakan-gerakan tarekat itu selalu bercirikan : *pertama*, pengembangan doktrin sufi melalui sistem ritual berfungsi memperkuat solidaritas sosial para penganut tarekat. *Kedua*, peranan Kaum Sufi dalam bentuk hubungan dan partisipasi sosial di tengah kemajemukan masyarakat pada umumnya menampilkan model gerakan sosial yang unik, khususnya sumbangan mereka terhadap pembinaan spiritual dan moralitas publik di tengah-tengah perubahan sosial. *Ketiga*, tipologi gerakan sosial Kaum Sufi pada umumnya bersifat *inklusifme-pragmatis; eksklusifme-fundamentalis; dan fundamentalisme-pragmatis*.

Adib Sofia menulis artikel yang berjudul Hegemoni Kriteria Estetik: Tinjauan Sosiologi Sastra atas *Cerpen Pilihan Kompas* dan *Cerpen Kompas Pilihan*. Hegemoni merupakan konsep yang dikenalkan Gramsci untuk menganalisis bentuk-bentuk praktik politik, budaya dan ideologi. Pendekatan mendasarnya adanya hubungan yang kompleks dan non mekanik antara budaya dan politik. Gramsci mempertanyakan bentuk kebudayaan manakah yang menjadi budaya massa yang diproduksi kontemporer. *Cerpen Kompas Pilihan* (Cerita Pendek Pilihan *Kompas*) dan *Cerpen Pilihan Kompas* (Cerita Pendek Pilihan *Kompas*) merupakan kumpulan cerita pendek terbaik yang dimuat di harian *Kompas*, salah satu penerbit terkemuka. Mereka mempublikasikan secara periodik sejak tahun 1970 dan menjadi salah satu produk dari masyarakat.

Muh. Syamsuddin menjelaskan tentang Pendidikan Damai:

sebagai Upaya Mencegah Budaya Anarkisme Pendidikan. Penulis menegaskan bahwa kekerasan merupakan bentuk hegemonik dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, hukum dan budaya. Termasuk dalam pendidikan dilakukan melalui proses dehumanisasi dari substansi dan metode pembelajaran. Metode pengajaran yang berlangsung selama ini dilakukan dengan pendekatan pedagogi atau seorang guru, menjadi figur yang sempurna (mengetahui tentang banyak hal) dan siswa hanyalah obyek. Tindakan ini disebut kekerasan pendidikan. Kekerasan ini dapat merusak kepribadian.

Islam dan Pekerjaan Sosial dianalisis oleh Zulkipli Lessy. Menurut Teologi Islam dan lima pilar Islam memiliki sejarah dan peran penting dalam pengembangan praktik pekerjaan sosial dan masyarakat Muslim. Beberapa efeknya dikaji dengan menggunakan review literatur dan melalui komparasi diantara masyarakat Muslim dan beberapa kelompok agama yang mengikutinya serta menguji teologi Muslim Shi'i dan Muslim Sunni. Konsep utama dari Islam, misalnya : syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji seharusnya dijalankan oleh pekerja sosial Muslim dalam praktiknya dalam masyarakat Muslim.

Achmad Maulani menulis tentang Pesantren dan Islam Indonesia: Kajian atas Pembaruan dan Peran Sosial Transformatif. Penulis menegaskan Pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU) dipahami sebagai pelopor utama Islam di Indonesia. Bukan hanya karena kelembagaan tradisionalnya sebagai rujukan dalam Islam, akan tetapi karena pengembangan pendidikan Islam yang menonjol serta pengembangan wacana keislaman. Perkembangannya akhir-akhir ini, kedua lembaga tersebut berkontribusi penting dalam membangun dialog antara nilai islam dan budaya lokal.

Artikel terakhir dalam kajian jurnal ini ditulis oleh Mohamad Jamal Thorik dalam tugas akhirnya yang berjudul Aksi Kolektif dalam Bersepeda: Studi Banding atas Sego Segawe (*Sepeda Kanggo Sekolah Lan Nyambut Gawé*) dan JLFR (*Jogja Last Friday Ride*) di Kota Yogyakarta. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan perbedaan antara Sego Segawe dan JLFR pada pola sosialisasi yang dibagi menjadi 5 mekanisme sosialisasi : 1) imitasi: Sego Segawe menggunakan keteladanan Walikota dan Pegawai Balaikota, sedangkan JLFR menggunakan keteladanan komunitas sepeda; 2) instruksi: Sego Segawe menggunakan Surat Edaran (SE) sebagai himbauan bersepeda, namun aspek instruksi tidak terdapat pada JLFR; 3) desiminasi: Sego Segawe kurang memaksimalkan sarana komunikasi, sementara JLFR menggunakan sarana *social media* dengan

intens; 4) motivasi: Sego Segawe menunjukkan dukungan melalui *reward* kepada pelajar sebagai duta sepeda, sedangkan JLFR menggalang dana untuk pesepeda korban kecelakaan; 5) penataran, Sego Segawe mengalami inkonsistensi pada pelaksanaan kampanye secara parsial, sedangkan JLFR melaksanakan kampanye secara rutin.

Demikian gambaran secara umum jurnal yang akan sidang pembaca nikmati edisi ini. Semoga apa yang tertuang dalam kajian ini memberikan sumbangan yang berarti dan menjadi sumber pengetahuan baru. Selamat membaca. *Wallahu a'lam bi shawab.*

*Wassalamualaikum wr. wb*

Redaksi

# IDENTIFIKASI RUMAH TANGGA RAWAN BENCANA GEMPA BUMI DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL-DI YOGYAKARTA

## **Nurhadi**

Dosen di Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Alamat E mail: nurhadi1974@gmail.com

## **Abstract**

*Depending on the condition of vulnerability, disasters bring about different consequences to different households. Using the Sustainable Livelihood (SLA) framework, the research carried out in the earthquake-prone area of Bantul-Yogyakarta results in three conclusions. First, the wealthiest suffer the least because of their capabilities of reducing the impact of earthquake disaster by fortifying their houses and by improving their livelihood assets. Second, despite their sufferings, the poor tend to be more able to reduce the impact of future disaster event to their livelihoods, thanks to the strong social capital which had minimized the cost of housing reconstruction. Third, it is the self-sufficient group which is most prone to the disaster event. This is due their wealth had been eroded by overwhelming cost of house reconstruction and their inabilities to reduce labor cost.*

*Key Words: vulnerability, sustainable livelihood framework, social capital and disaster risk reduction.*

## **Intisari**

Perbedaan daya tahan menyebabkan adanya perbedaan dampak bagi setiap rumah tangga yang mengalami bencana. Dengan menggunakan metode Sustainable Livelihood (SLA), penelitian ini mengkaji dampak bencana di daerah rawan bencana Bantul, Yogyakarta. Ada tiga kesimpulan : (1) orang yang paling kaya menderita paling sedikit bencana karena kemampuannya mengurangi dampak bencana dengan memperkuat rumahnya dan menggunakan aset yang

dimilikinya, (2) penderitaan yang dialami, menjadikan orang miskin mampu mengurangi dampak dari kejadian bencana di masa depan untuk keberlangsungan hidupnya dengan memaksimalkan modal social sehingga meminimalkan biaya untuk membangun rumah dan (3) kelompok bertahan hidup yang paling rentan terhadap peristiwa bencana karena kekayaannya sudah habis untuk biaya rekonstruksi dan ketidakmampuannya mengurangi biaya buruh.

Kata Kunci : Daya Tahan, Sustainable Livelihood Framework, Modal Sosial dan Pengurangan Resiko Bencana

## Pendahuluan

Bencana gempa bumi yang melanda wilayah selatan Yogyakarta tahun 2006 lalu menyisakan sejumlah pertanyaan penting di kalangan peneliti sosial. Salah satu perdebatan panjang yang masih belum usai hingga hari ini adalah mengapa korban jiwa yang ditimbulkan begitu besar; mengapa kerusakan yang ditinggalkan begitu massif; dan mengapa trauma psikologis yang diderita para korban begitu mendalam. Bagi ilmuwan alam, faktor geologis, kualitas bangunan, dan buruknya penataan kawasan dan infrastruktur adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ilmuwan sosial berusaha menggali lebih dalam jawaban teknokratis tersebut dengan menawarkan penjelasan yang lebih menonjolkan faktor sosial, ekonomi, politik, dan kultural sebagai akar persoalan yang dialami masyarakat yang tinggal di wilayah bencana tersebut.

Tulisan ini berangkat dari konsep yang dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan sosial bahwa besarnya dampak bencana disebabkan oleh tingginya kerentanan dan bahwa kerentanan adalah produk dari interaksi antara kondisi alam dengan aktivitas manusia.<sup>1</sup> Unit analisis yang dipilih adalah rumah tangga. Hal ini didasari atas asumsi bahwa rumah tangga adalah unit sosial terkecil tempat sejumlah individu menjalin hubungan ekonomi, sosial, psikologis, dan, politik (sekurang-kurangnya dalam pengertian substantif). Sebagai sebuah institusi, dinamika rumah tangga mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh anggota-anggotanya. Sampel yang dipilih adalah rumah tangga korban bencana gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 yang menghuni wilayah kabupaten Bantul. Penelitian ini menerapkan tiga metode : (1) *survei*

---

1 Wisner, *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters*, 2007

terhadap 80 rumah tangga di Kecamatan Piyungan, Pleret, Banguntapan dan Jetis. (2) PRA dan (3) Hasil dari survei dan PRA menjadi bahan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan peserta diskusi adalah mereka yang mewakili tokoh informal, perempuan, pemerintah desa, pemuda, asosiasi petani, dan asosiasi pengusaha. Penelitian ini mengkaji: (1) bagaimana masyarakat tersusun atas sejumlah rumah tangga yang mengikatkan diri dalam satu kesatuan sosial. Setiap rumah tangga memiliki kondisi dan kapabilitas yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk menahan dan meminimalisasi dampak bencana. Yang menjadi pertanyaan adalah rumah tangga dengan karakteristik seperti apa kah yang cenderung lebih atau kurang rentan terhadap bencana? Dan (2) Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi terhadap perikehidupan rumah tangga? Adakah perbedaaan pada masing-masing kategori rumah tangga?

### **Pendekatan Kebencanaan**

Pendekatan kebencanaan di Indonesia telah mengalami pergeseran sejak satu dekade terakhir. Paradigma lama, yaitu gawat darurat, dilengkapi dengan mitigasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Di masa lampau, partisipasi masyarakat bersifat pasif dan lebih banyak didorong oleh adanya mobilisasi. Kini, partisipasi aktif dipandang sebagai sebuah kebutuhan. Manajemen bencana, yang dahulu dipisahkan, kini diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan mitigasi, yang pada era sebelumnya lebih banyak diwarnai oleh pendekatan terhadap kerentanan (*vulnerability*), kini beralih pada analisis risiko (*risk analysis*) yang memadukan kerentanan dengan daya tahan masyarakat. Mengurangi kerentanan adalah aspek terpenting dalam upaya pengurangan risiko.<sup>2</sup> Semua itu didorong oleh munculnya kesadaran baru sejak limabelas tahun terakhir tentang pentingnya meminimalisasi dampak dan mengurangi risiko bencana. Undang Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 1 ayat 1 mendefinisikan bencana sebagai:

“... peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya

---

2 O'Brien, Geoff; Phil O'Keefe; Joanne Rose; dan Ben Wisner (2006) "Climate change and disaster management", *Disasters 30 (1)*, hlm. 64 - 80

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

Definisi menurut Undang-Undang tersebut selaras dengan tiga kategori bencana menurut sifatnya, yaitu alami, buatan manusia, dan kombinasi keduanya<sup>3</sup>. Secara eksplisit terlihat besarnya penekanan yang diberikan pada aspek sosial dan ekonomi dalam kebijakan kebencanaan di Indonesia.

Dampak bencana tidak dirasakan secara sama dan merata oleh korban. Sebagian kelompok di dalam masyarakat mengalami dampak yang lebih buruk dibandingkan dengan kelompok lain. Faktor utama yang menjadi penyebab adalah kerentanan. Dalam literatur manajemen bencana, kerentanan didefinisikan sebagai:

*“...the characteristics of a person or group and their situation that influence their capacity to anticipate, cope with, resist and recover from the impact of a natural hazard (an extreme natural event or process). It involves a combination of factors that determine the degree to which someone’s life, livelihood, property and other assets are put at risk by a discrete and identifiable event (or series or ‘cascade’ of such events) in nature and in society.”*<sup>4</sup>

Sejumlah kajian melihat keterkaitan erat antara kemiskinan dengan tingkat kerentanan terhadap bencana. Melihat data kebencanaan global selama 105 tahun terakhir, Eshghi dan Larson (2008) sampai kepada kesimpulan bahwa kemiskinan menyebabkan banyak orang menghadapi risiko cedera dan kematian akibat bencana alam. Mereka mengkhawatirkan akan terjadinya peningkatan angka kematian dan jumlah kerugian karena ada kecenderungan peningkatan warga miskin yang tinggal di daerah-daerah dengan kerawanan tinggi. Data yang dikumpulkan oleh *Center for Research on the Epidemiology Disasters* (CRED) yang berbasis di Belgia menunjukkan bahwa negara-negara miskin adalah yang mengalami dampak bencana terparah. Lebih jauh lagi, dilaporkan bahwa masyarakat miskin adalah kelompok yang paling menderita.<sup>5</sup> Kemiskinan, buruknya infrastruktur, lemahnya tata kelola kebencanaan, kurangnya tenaga kesehatan, dan rendahnya

---

3 Katrina Allen, *Community-based disaster preparedness and climate adaptation: local capacity-building in the Philippines*, *Disasters*, 30 (1), hlm. 81 – 101.

4 Wisner, *At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability and Disasters.*, 2005, hlm.1

5 Geoff O’Brien, Ben Wisner, “Climate change and disaster management”, *Disasters* 30 (1), 2006, hlm. 64 – 80.

kesiapsiagaan adalah beberapa dari sekian banyak faktor dominan yang menyebabkan besarnya angka kematian dan skala kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Di India, kemiskinan akut di wilayah Orissa juga diyakini menjadi faktor utama besarnya korban yang menurut laporan resmi mencapai angka 10.000 orang akibat badai yang terjadi pada tahun 1999 di provinsi tersebut.<sup>6</sup> Pada kasus erosi tepian sungai di Bangladesh, Hutton (2004) menyimpulkan bahwa ketika bencana terjadi, orang-orang miskin menjual tanah, ternak, bahan bangunan, dan barang berharga milik mereka agar dapat bertahan hidup. Situasi ini menyebabkan mereka semakin terpuruk dalam kemiskinan dan semakin rentan terhadap ancaman bencana yang berpotensi masih terjadi di kemudian hari. Namun demikian, sebagian peneliti lain justru meragukan generalisasi semacam itu. Secara garis besar, argumen mereka adalah bahwa kemiskinan bukan merupakan satu-satunya faktor. Faktor lain yang juga dianggap turut serta mempengaruhi adalah konteks dinamika sosial, politik, dan ekonomi makro suatu masyarakat. Studi yang dilakukan Deng (2008) tentang kekeringan pada wilayah perang saudara di Sudan Selatan, misalnya, menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi kemiskinan tidak serta merta menjadikan masyarakat kurang rentan dampak bencana.

Diperlukan pemahaman yang lebih holistik agar kita dapat sampai kepada pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kompleksitas relasi antar-faktor yang turut memberi kontribusi kepada kondisi rentan. GTZ menyatakan bahwa kerentanan harus dipahami sebagai dinamika dari tiga faktor yang saling berkelindan, yaitu institusi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Terkait dengan faktor sosial budaya, rendahnya pendidikan, fatalisme keagamaan, tradisi yang terkait dengan tata guna lahan dan manajemen pertanahan, dan rapuhnya jaringan sosial yang dipakai untuk menegosiasikan berbagai kepentingan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, kerentanan harus dianalisis mulai dari level individu, gender, rumah tangga, kelompok, komunitas, sampai pada wilayah yang lebih luas. Kesalahan menetapkan fokus berpotensi mengaburkan kesimpulan.

Berdasarkan definisi sebagaimana yang dikemukakan Ben Wisner pada bagian pendahuluan di atas, kerentanan terkait erat dengan kondisi sekelompok manusia serta dengan proses sosial, ekonomi dan politik yang menyebabkan masyarakat terpapar kondisi rentan tersebut. Sejalan

---

<sup>6</sup> Frank Thomalla, 'We all knew that a cyclone was coming': disaster preparedness and the cyclone of 1999 in Orissa, India", 2004, *Disasters* 28 (4), hlm. 373 - 387.

dengan konsep tersebut, UNDP<sup>7</sup> merumuskan konsep kerentanan orang (*human vulnerability*), yang didefinisikan sebagai kondisi atau suatu proses yang berasal dari faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kecenderungan dan skala kerusakan dari suatu marabahaya (*hazard*). Dengan model yang diberi nama Access Model, Wisner (2004) berusaha menunjukkan secara terperinci tentang hal-hal yang terjadi pada titik temu antara peristiwa alam dengan proses-proses sosial jangka panjang. Model ini menunjukkan bagaimana kehidupan yang normal berubah menjadi abnormal, dan serta kapan dan bagaimana situasi abnormal tersebut berlangsung. Model ini menguraikan besarnya “akses” yang dimiliki orang, asset, serta sejumlah peluang yang menambah atau mengurangi kerentanan mereka dalam menghadapi bencana.

Kapabilitas individu, keluarga, kelompok, kelas, atau komunitas dalam memanfaatkan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan perikehidupan di saat normal, yaitu ketika tidak terjadi bencana, dan kemampuan mereka beradaptasi dengan situasi yang baru dan membahayakan. Akses terhadap sumberdaya material (antara lain tanah, ternak, peralatan, modal, simpanan, cadangan makanan, perhiasan) dan non-material (antara lain pengetahuan, keterampilan, posisi struktural dalam masyarakat, gender, keanggotaan pada kelompok atau organisasi) adalah hasil dari relasi sosial ekonomi. Termasuk di dalam relasi sosial adalah produksi, gender, etnisitas, status, dan usia. Hal ini mengandung asumsi bahwa hak dan kewajiban tidak terdistribusikan secara merata di tengah-tengah masyarakat. Polanya tergantung pada (dan merupakan hasil dari) pengambilan keputusan, upaya untuk memperoleh sumberdaya dan kerjasama yang dikembangkan oleh orang. Relasi sosial meliputi aliran barang, uang, dan surplus antar anggota.<sup>8</sup> Hak, kewajiban, harapan dalam rumah tangga yang mempengaruhi alokasi kerja dan imbalan membentuk sekaligus dibentuk oleh relasi tersebut.

Kerangka kerja Perikehidupan Berkelanjutan (*Sustainable Livelihood Framework* - SLF) dipilih sebagai model dalam penelitian ini untuk menjelaskan kerentanan rumah tangga wilayah kabupaten Bantul terhadap bencana gempa bumi. Awalnya diperkenalkan oleh International Development Studies (IDS), sejak dua dasawarsa terakhir

---

7 UNDP, 2004, hlm.11

8 B. Wisner, *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters.*, 2004, hlm.94

SLF banyak dipakai oleh lembaga-lembaga pembangunan dan lembaga swasaya masyarakat untuk menjelaskan perikehidupan kelompok miskin. Secara umum kerangka kerja ini terdiri dari dua konsep, yaitu perikehidupan dan keberlanjutan. Mengutip IDS, Scoones<sup>9</sup> (1999: 5) menyatakan bahwa:

*“A livelihood comprises the capabilities, assets (including both material and social resources) and activities required for a means of living. A livelihood is sustainable when it can cope with and recover from stresses and shocks, maintain or enhance its capabilities and assets, while not undermining the natural resource base.”*

Konsep keberlanjutan merujuk pada kemampuan untuk mengatasi dan memulihkan diri dari tekanan, situasi mendadak, dan kedaruratan. Dipahami sebagai lingkungan eksternal dan bagaimana orang beradaptasi dan mengatasi lingkungan tersebut, konteks kerentanan membawa dampak langsung kepada aset yang dimiliki rumah tangga sekaligus mempengaruhi pilihan-pilihan tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan perikehidupan rumah tangga tersebut. Elemen kunci dari kerangka kerja ini adalah lima aset (manusia, sosial, natural, fisik, dan finansial) yang dimiliki, diakses, dan dikontrol oleh rumah tangga. Kelimanya digambarkan dalam bentuk segilima. Bentuk segilima tersebut berubah seiring dengan perubahan kepemilikan dan akses terhadap aset-aset tersebut. Modal manusia terdiri dari keahlian, pengetahuan, kondisi sehat, dan pekerjaan yang memungkinkan rumah tangga dan individu yang bernaung di dalamnya mencapai tujuan-tujuan perikehidupannya. Modal sosial berarti sumberdaya sosial yang dibangun melalui jaringan, hubungan, keanggotaan dalam kelompok formal, dan relasi kepercayaan serta resiprositas. Modal natural merujuk pada sumberdaya alam dan jasa lingkungan. Modal fisik meliputi infrastruktur dasar dan barang-barang produksi. Modal finansial terdiri dari dua sumber: cadangan dan aliran uang reguler. Analisis aset mempertimbangkan perubahan aset, sebab-sebab perubahan dan bagaimana akses dan control terhadap aset berbeda di antara kelompok sosial.<sup>10</sup> Analisis ini juga menekankan perubahan struktur dan proses pada level pemerintah, sektor swasta, kebijakan, dan institusi, yang dapat mengubah konteks kerentanan.

---

9 Scoones, *Sustainable rural livelihoods: a framework for analysis*, IDS Working Paper 72., 1999, hlm. 5

10 Carney, *Sustainable Livelihoods Approaches: Progress and Possibilities for Change*, Toronto: DFID, 2002

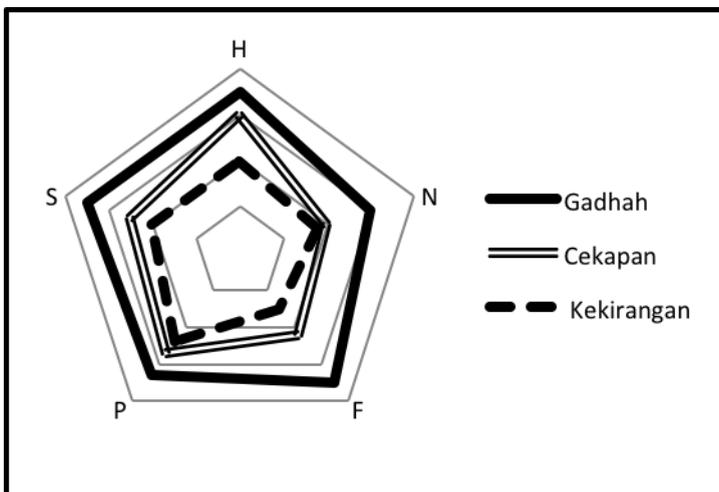
## Kategori Kesejahteraan

Survei yang dilakukan terhadap kepemilikan, akses, dan aset modal perikehidupan (manusia, natural, finansial, fisik, dan sosial), menghasilkan tiga kategori kesejahteraan rumah tangga, yaitu golongan makmur, menengah, dan miskin. Ketika data tersebut dipadukan dengan telaah yang dilakukan dalam PRA, diperoleh kategori lokal yang dipandang dapat mewakili kondisi masing-masing golongan, yaitu *gadhah* (berpunya), *cekapan* (berkecukupan), dan *kekirangan* (miskin, sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.)

### 1. Golongan Makmur (*tiyang gadhah*)

Secara harafiah, *tiyang gadhah* berarti “orang berpunya”, yaitu mereka yang masuk dalam kelompok termakmur di desa. Berdasarkan data dari PRA, mereka memiliki ciri-ciri antara lain: terdidik; mampu membiayai ongkos perawatan di rumah sakit tanpa harus menggoyahkan stabilitas ekonomi rumah tangga; memiliki rumah yang berstruktur kuat sehingga relative tahan terhadap guncangan gempa; memiliki motor dan mobil sebagai sarana transportasi sehari-hari; berpenghasilan tinggi; memiliki tabungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang dan kebutuhan mendadak; memiliki akses terhadap system perbankan modern; menduduki posisi penting secara sosial; serta memiliki jaringan sosial yang luas dan kuat.

Gambar 1. Profil Rumah Tangga Menurut Kesejahteraannya



Sumber: Data Primer dari PRA

Mereka juga berlangganan surat kabar nasional dan lokal, jaringan televisi kabel, dan jasa layanan internet, yang mengindikasikan tingginya hasrat mereka untuk memperoleh pengetahuan dan informasi terbaru. Yang termasuk dalam golongan ini adalah pegawai negeri, pengusaha sukses, elit desa, dan karyawan bergaji tinggi.

## **2. Golongan Menengah (*tiyang cekapan*)**

Sekalipun disebut sebagai “menengah”, kondisi rumah tangga golongan ini terpaut relatif jauh dengan golongan makmur. Termasuk di dalam golongan ini adalah pekerja kerah biru, pedagang ternak, pedagang perantara komoditas pertanian, serta pemilik warung, dan toko kecil. Terbatasnya pekerjaan di pedesaan menyebabkan mereka cenderung memilih aktivitas non-pertanian. Dalam kurun waktu tiga puluh tahun terakhir, terjadi kecenderungan mendorong anak laki-laki yang telah menyelesaikan pendidikannya untuk bermigrasi, mencari pekerjaan ke sejumlah kota utama di pulau Jawa. Strategi ini pada dasarnya bertujuan mengurangi tekanan akibat minimnya pendapatan, pada satu sisi, dan semakin besarnya biaya untuk menafkahi anggota keluarga, pada sisi yang lain. Disebut “*tiyang cekapan*”, karena mereka sanggup mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, namun hanya sanggup sampai pada derajat “tercukupi” karena mayoritas sebagian penghasilannya dihabiskan untuk konsumsi rumah tangga.

Hanya ada porsi sangat kecil dari penghasilan tersebut yang dapat ditabung. Akses terhadap layanan perbankan modern hanya terbatas pada simpanan jangka pendek. Simpanan dalam bentuk deposito tidak menjadi pilihan karena kekhawatiran terhadap tingginya inflasi, rendahnya bunga simpanan, dan kemungkinan bangkrutnya bank yang dapat berakibat pada kerugian keuangan serius mereka. Rumitnya prosedur, bunga pinjaman yang tinggi, dan tiadanya jaminan menghambat mereka dari akses pinjaman dari bank. Dalam situasi tersebut, ada dua pilihan yang tersedia untuk mereka, yaitu meminjam uang kepada rentenir atau koperasi. Ketika membutuhkan dana besar yang tidak dapat dijangkau oleh penghasilan rutin, pinjaman kepada koperasi lebih mereka dipilih karena bunga yang relatif rendah serta jadwal angsuran yang lebih fleksibel. Jenis kredit lain yang disukai golongan rumah tangga ini adalah kredit konsumen, misalnya ketika mereka ingin membeli sepeda motor. Menurut pandangan mereka, pembayaran lunas cenderung menggerogoti kondisi keuangan rumah tangga. Selain itu, nilai uang dipersepsikan cenderung mengalami

devaluasi dari waktu ke waktu. Dengan tingginya angka inflasi, menunda pembelian barang lebih dari satu tahun dipandang tidak bijak, menghabiskan banyak waktu, dan keliru secara hitungan ekonomi. Pembayaran secara mengangsur juga dipersepsikan membuka “ruang manuver” untuk lebih dapat mengoptimalkan uang tunai yang masih dimiliki. Yang justru terjadi adalah berhutang berpotensi menyeret kepada kerugian finansial, karena ada keharusan untuk memperketat pengeluaran rumah tangga.

Pemenuhan kebutuhan lain, seperti asuransi kesehatan, dana pension, dan penguatan struktur bangunan rumah tinggal cenderung diabaikan. Keikutsertaan dalam asuransi golongan ini sangat rendah. Bagi mereka, asuransi kesehatan swasta terlalu sulit dijangkau. Ketika menderita sakit, dalam rangka penghematan, alih-alih pergi ke dokter, mereka lebih memilih mengkonsumsi jamu tradisional atau mengunjungi matri kesehatan dan bidan desa terdekat. Jika kondisi kesehatan mereka semakin memburuk dan memerlukan perawatan kesehatan yang lebih kompleks dengan biaya besar, ada dua pilihan yang tersedia: meminjam kepada rentenir atau menggadaikan aset, khususnya sepeda motor dan sertifikat tanah. Kedua pilihan tersebut sama-sama berisiko tinggi bagi kondisi ekonomi rumah tangga. Ketika terjadi situasi darurat, yang memerlukan pengeluaran besar, seperti perawatan penyakit kritis dan bencana, kelompok ini berpotensi mengalami kebangkrutan.

### **3. Golongan Miskin (*tiyang kekurangan*)**

Mereka berada pada strata termiskin di dalam masyarakat. Yang termasuk dalam kategori ini adalah rumah tangga yang biasanya bergantung kepada pendapatan harian yang tidak tetap dan tidak rutin. Buruh bangunan harian, buruh tani, pembantu rumah tangga, pengemudi becak, pengemudi angkutan umum, kuli, dan pedagang asongan. Penghasilan rata-rata mereka berkisar antara Rp 30,000,- sampai dengan Rp 50.000,- per hari. Sebagian besar penghasilan mereka dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya makanan, tagihan listrik, angsuran pinjaman, dan rokok. Akumulasi modal finansial hampir mustahil mereka lakukan. Dampak terbesar yang mereka alami adalah ketidakmampuan untuk menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari SLTA; membeli sarana transportasi yang memadai; dan membangun rumah yang tahan gempa. Yang membuat mereka tidak beranjak dari kondisi ketidakmampuan adalah tidak ajegnya pendapatan dan ketergantungan kepada kepala keluarga

sebagai pencari nafkah. Keterampilan yang rendah adalah faktor utama yang mempersulit mereka memperoleh pekerjaan di sektor formal, sehingga memperbaiki kehidupan adalah sesuatu yang berat untuk diraih.

Lingkungan kerja yang buruk; beban kerja fisik yang berat; dan tingginya konsumsi makanan kurang sehat, khususnya untuk makan siang, menjadikan mereka lebih rentan terhadap penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus dan bakteri, khususnya hepatitis dan demam tifus. Biaya kesehatan bukan sesuatu yang terlalu mengkhawatirkan karena mereka adanya beberapa skema jaminan sosial yang dikelola oleh negara, antara lain BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Jaminan Kesehatan dan Sosial (Jamkesos). Dalam hal ini, pemerintah membayarkan premi untuk mereka.

### **Identifikasi Kelompok Rentan Bencana**

Dampak bencana gempa bumi tahun 2006 dirasakan berbeda oleh masing-masing golongan rumah tangga, namun ada satu dampak yang dirasakan oleh hampir seluruh rumah tangga, yaitu kerusakan bangunan rumah dan infrastruktur. 80 per sen rumah di wilayah Bantul dilaporkan mengalami kerusakan berat. Sebagian besar di antaranya adalah rumah yang dibangun antara tahun 1980-an dan 1990-an, yaitu periode ketika teknik konstruksi modern mulai banyak mempengaruhi konstruksi perumahan di pedesaan. Rumah tradisional yang terbuat dari kayu dan bambu digantikan oleh bangunan baru berbahan dasar dari batu bata yang dilekatkan dengan tanah dan semen tanpa rangka penguat baja.

Hal ini menyebabkan efek domino. Tembok yang runtuh, atap yang hancur, yang diikuti oleh hujan deras yang menimpa wilayah gempa merusak sebagian besar peralatan elektronik, kendaraan, perabotan rumah tangga, alas tidur, dan pakaian. Pemilik rumah banyak mengalami kesulitan menemukan kembali barang-barang berharga akibat banyaknya timbunan material bangunan. Aset finansial rumah tangga banyak dikeluarkan untuk pembangunan kembali rumah yang rusak berat. Mereka harus menarik dana yang mereka simpan di bank, menjual perhiasan, binatang ternak, serta aset-aset lain yang dapat diuangkan, seringkali dengan harga yang lebih rendah.

Situasi semakin memburuk karena terjadinya peningkatan biaya pembangunan rumah sampai dengan 200 persen. Survei yang dilakukan terhadap 20 toko bangunan di wilayah Bantul menunjukkan terjadinya

inflasi tajam antara bulan Maret sampai dengan November 2007 akibat tingginya permintaan bahan bangunan untuk aktivitas rekonstruksi rumah. Faktor lain yang menyebabkan naiknya biaya pembangunan kembali adalah meningkatnya upah tenaga kerja (tukang dan buruh bangunan). Tingginya permintaan tenaga kerja di sektor ini tidak dapat dipenuhi secara lokal, sehingga tenaga kerja luar daerah banyak didatangkan.

Dibandingkan dengan rumah tangga yang lain, derita dan kerugian yang dialami golongan kaya lebih sedikit. Tingginya tingkat kesejahteraan ekonomi, besarnya modal manusia, dan modal sosial menjadi faktor terpenting yang secara efektif meredam efek bencana. Mereka adalah kelompok yang mampu membangun rumah dengan standar tinggi ketahanan gempa. Sekalipun ada sebagian dari rumah mereka yang mengalami kerusakan parah, ongkos yang mereka keluarkan untuk rekonstruksi tidak menyebabkan goyahnya kondisi ekonomi rumah tangga. Sebagian dari mereka bahkan dapat mengambil peluang dari aktivitas rekonstruksi perumahan. Dengan akses ke sistem perbankan modern, para entrepreneur membuka usaha di sektor jasa penjualan dan transportasi bahan bangunan.

Kerugian terbesar yang diderita keluarga miskin berupa hilangnya sumber pendapatan untuk sementara waktu dan kerusakan rumah. Sejumlah proyek bangunan berhenti sementara selama beberapa bulan pasca bencana, sehingga banyak orang yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan di sektor konstruksi harus menganggur. Usaha kecil dan menengah berhenti beroperasi akibat kerusakan tempat usaha dan peralatan produksi. Para pembantu rumah tangga juga kehilangan pekerjaan mereka karena majikan yang mempekerjakan mereka terpaksa memfokuskan pengeluarannya untuk pemulihan kondisi ekonomi pasca bencana. Merosotnya modal manusia terjadi akibat cacat fisik dan kematian tulang punggung ekonomi rumah tangga. Kematian berarti hilangnya peluang pendapatan; cacat fisik berarti semakin terbatasnya pekerjaan; dan luka serius berarti tertundanya waktu untuk memperoleh pendapatan. Terlalu banyaknya korban yang harus dirawat yang berakibat berkurangnya standar perawatan di rumah sakit berujung pada situasi ketika anggota keluarga yang selamat harus menghabiskan banyak waktu dan menghabiskan banyak dana untuk menunggui pasien. Terlebih lagi, sebagian besar rumah sakit berlokasi jauh dari tempat tinggal mereka.

Kendati mengalami banyak kerugian, kelompok miskin dapat memperoleh sejumlah keuntungan setelah terjadinya bencana, terutama ketika memasuki fase rekonstruksi perumahan. Modal sosial golongan rumah tangga ini mengalami peningkatan, yang antara lain ditunjukkan oleh semakin kuatnya ikatan sosial antar anggota masyarakat dan meluasnya jaringan sosial dengan pengambil keputusan di tingkat lokal. Tetangga, saudara, dan sahabat-sababat semakin meningkat kepeduliannya dan menunjukkan solidaritas yang lebih tinggi, dengan menawarkan bantuan untuk meringankan beban selama rekonstruksi rumah. Dua praktik sosial yang sudah lama mengendur, yaitu gotong royong dan ronda keliling, kembali menguat. Gotong royong antara lain dipraktikkan dalam bentuk pembersihan reruntuhan bangunan dan rekonstruksi rumah. Terutama pada rekonstruksi rumah, praktik gotong royong dilakukan dengan penyediaan timbal balik jasa tenaga tukang dan buruh bangunan secara cuma-cuma. Hal ini biasanya dilakukan di sore hari dan akhir pekan ketika para pekerja bangunan tidak sedang mengerjakan aktivitas rutinnya. Adanya ronda keliling mengurangi kekhawatiran warga yang masih tinggal di hunian sementara terhadap kehilangan barang berharga di bekas bangunan rumah mereka.

Petani yang mengerjakan lahan minim irigasi teknis mengambil peluang dengan memanfaatkan tanah untuk memenuhi tingginya permintaan akan batu bata. Produksi batu bata ini memiliki sejumlah keunggulan karena rendahnya keterampilan dan modal finansial yang dibutuhkan. Tukang batu bangunan memperoleh manfaat berupa peningkatan pendapatan ketika mereka membangun rumah di rumah tangga makmur dan menengah. Peningkatan upah bervariasi antara 60 sampai dengan 80 persen. Asisten tukang yang sudah merasa cukup memiliki pengalaman menaikkan posisi mereka menjadi tukang.

Golongan menengah mengalami situasi terburuk. Minimnya simpanan yang mereka miliki; keengganan untuk mengikuti program asuransi; dan tingginya biaya rekonstruksi rumah pasca gempa menguras kemampuan ekonomi mereka. Berbeda dengan golongan miskin yang dapat menghemat biaya tenaga kerja rekonstruksi rumah dengan menjalankan aktivitas bantuan timbal balik suka rela, besarnya biaya ini sulit diminimalisasi oleh golongan menengah karena semua biaya harus mereka bayarkan secara tunai.

## Penutup

Ada tiga kesimpulan yang dihasilkan oleh penelitian ini:

1. Dampak bencana gempa dirasakan relatif minim oleh kelompok makmur. Hal ini disebabkan oleh kemakmuran yang mereka miliki, seperti ditunjukkan oleh kuatnya modal sosial, tingginya modal manusia dan modal finansial, luasnya akses ke modal fisik dan modal natural. Ketika bencana menimpa, mereka lebih cepat memulihkan diri. Pada fase rekonstruksi, sebagian dari rumah tangga yang masuk dalam kategori ini bahkan dapat memperoleh manfaat, antara lain dengan membuka usaha baru yang terkait dengan penjualan dan transportasi bahan bangunan untuk pembangunan rumah dan infrastruktur setempat.
2. Kendati mengalami banyak kerugian, dampak bencana terhadap kelompok miskin cenderung tidak terlampaui parah. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah program bantuan dan jaminan sosial, antara lain dalam bentuk asuransi kesehatan, yang disediakan oleh negara. Di samping itu, mereka dapat mengurangi biaya rekonstruksi rumah dengan menjalankan sistem pertolongan timbal balik sukarela dalam membangun kembali rumah.
3. Kelompok menengah adalah yang paling menderita karena dua faktor. Pertama, skema jaminan sosial yang disediakan oleh negara tidak menjangkau kelompok ini, sehingga mereka harus melikuidasi sejumlah aset dan simpanan mereka ketika berada dalam situasi darurat. Kedua, tidak adanya mekanisme pertolongan timbal balik sukarela menyebabkan mereka harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk keperluan pembangunan kembali rumah mereka yang rusak karena gempa bumi.

## Daftar Bacaan

- Allen, Katrina (2006), *Community-Based Disaster Preparedness and Climate Adaptation: Local Capacity-Building in the Philippines*, Disasters, 30 (1).
- Bolin, Robert (1998), *Northridge Earthquake: Vulnerability and Disaster*. London: Routledge.
- Bowen, J R (1986), *On the Political Construction of Tradition: Gotong Royong in Indonesia*, *Journal of Asian Studies* 45..
- Carney, D. (2002), *Sustainable Livelihoods Approaches: Progress and Possibilities for Change*, Toronto: DFID.

- Deng, Luka Biong (2008), *Are non-poor households always less vulnerable? The case of households exposed to protracted civil war in Southern Sudan*, *Disasters* 32 (3), halaman 377 – 398.
- Eshghi, Kourosh; Richard C Larson (2008), *Disasters: lessons from the past 105 years*”, *Disaster Prevention and Management* Vol 17, No. 1.
- Hutton, David; C Emdad Haque (2004), *Human vulnerability, dislocation and resettlement: adaptation processes of river-bank erosion-induced displaces in Bangladesh*, *Disaster* 28 (1).
- O’Brien, Geoff; Phil O’Keefe; Joanne Rose; dan Ben Wisner (2006), *Climate change and disaster management*, *Disasters* 30 (1).
- Oliver-Smith, Anthony (2004), *Mapping Vulnerability: Disaster Development and People*. London: Earthscan.
- Scoones, I (2000), *Sustainable rural livelihoods: a framework for analysis*, *IDS Working Paper* 72.
- Shaluf, Ibrahim Mohamed (2007), *Disaster types*, *Disaster Prevention and Management* Vol 16, No. 5.
- Swiss Agency for Development and Cooperation (2008), *Guidelines on Disaster Risk Reduction*. Bern: Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC).
- Thomalla, Frank (2004), *We all knew that a cyclone was coming’: disaster preparedness and the cyclone of 1999 in Orissa, India*, *Disasters* 28 (4).
- Wisner, B. (2007), *At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability and Disasters*. London: Routledge.